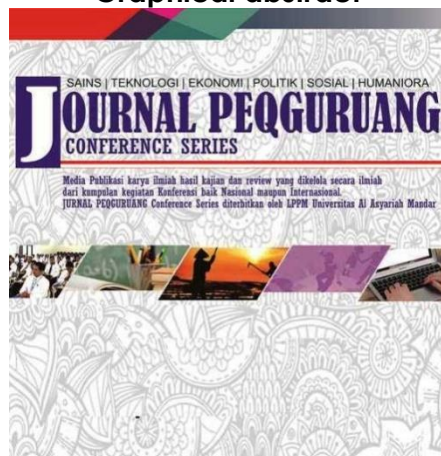


Graphical abstract



PERSEPSI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG BPJS KESEHATAN MANDIRI DI DESA SEGERANG KECAMATAN MAPILLI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

¹*Suhaina, ² Syamsu Alam, ³Ade Rahayu

Program Studi Ppkn Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Al Asyariah Mandar

Corresponding email:
inasuhaina999@gmail.com

Abstract

Health BPJS (Health social security agency) is a state-owned enterprise specifically assigned by the government to organize government guarantees to provide health care guarantees for all Indonesians. but among the public comes a perception that is still not good with the health bpjs program, such as the lack of services provided by health care workers to healthcare professionals, inadequate attitude of health workers towards health care patients and inadequate place or room of health care workers. This research is quantitative descriptive research, the formulation of the problem in this research is how the community's perception in the implementation of public policy regarding independent health bpjs. The purpose of this study is to find out how people's perceptions are in implementing public policies regarding independent health bpjs in segerang village, mapilli sub-district, polewali mandar district. As for the research instruments used research, interviews, and observation, the research sample was seventy-seven people, seventeen people who use bpjs independent and sixty health bpjs users funded by the government. Based on the results of the study show that public perception in the implementation of public policies about the independent health bpjs is good enough which can be known by using a formula $p = f / n \times 100$.

Keywords: *Community Perception, Sel-Supporting Social Health Insurance Body*

Abstrak

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara jaminan social kesehatan) Merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemerintah dan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dikalangan masyarakat muncu persepsi yang masih kurang baik dengan program BPJS Kesehatan, seperti kurangnya pelayanan petugas kesehatan dan sikap petugas kesehatan yang kurang ramah dan tempat/ruangan pasien terhadap pasien BPJS Kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Persepsi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan publik tentang BPJS Kesehatan Mandiri. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat dalam implementasi kebijakan publik tentang BPJS Kesehatan mandiri di desa segerang kecamatan mapilli kabupaten polewali mandar. Instrument penelitian yang digunakan yaitu Angket, Wawancara dan Observasi, Sampel penelitian berjumlah 77 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dalam implementasi kebijakan public tentang BPJS Kesehatan mandiri cukup Baik, yang dapat diketahui dengan menggunakan wawancara dan Angket dengan menggunakan rumus $p = f / n \times 100$.

Kata kunci: *Persepsi Masyarakat, BPJS Kesehatan Mandiri*

Article history

DOI: <https://dx.doi.org/10.35329/jp.v3i2.1624>

Received : 22 Juli 2021 | Received in revised form : 28 Agustus 2021 | Accepted : 22 Oktober 2021

1. PENDAHULUAN

BPJS Kesehatan yaitu suatu badan hukum yang terbentuk untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Yang menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan JKN yaitu aspek kepesertaan. hingga desember 2016 BPJS Kesehatan menjamin 171.677.176 dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia 255,5 juta dan yang lain belum terjamin BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk jumlah peserta yang mandiri masih kurang atau masih rendah yaitu sekitar 11,20% dari total keseluruhan peserta mandiri mencakup pekerja informal. (Mania, 2017).

Undang-undang nomor 36 tahun 2009 bahwa kesehatan yaitu keadaan sehat baik secara fisik, mental spiritual atau social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif social dan ekonomi. Sedangkan upaya kesehatan yaitu setiap kegiatan itu untuk memelihara, meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat (Widiastuti Ika, 2017).

Kesadaran tentang pentingnya kesehatan dalam mewujudkan kesejahteraan social masyarakat, yang membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang jaminan perlindungan social. Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan social Nasional menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan social bagi seluruh rakyatnya. Badan penyelenggara jaminan social diatur dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2011 yang mengatur hukum public yang ditugaskan oleh pemerintah untuk BPJS menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan diresmikan pada tanggal 31 desember 2013 dan beroperasi mulai tanggal 1 januari 2014. (Rajagukguk, 2019).

Implementasi kebijakan public yaitu salah satu proses dari siklus kebijakan, posisi implementasi kebijakan sangat penting dalam kebijakan publik. Pentingnya kebijakan dijelaskan bahwa implementasi kebijakan lebih penting dari perumusan kebijakan/sebuah alat dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik untuk bekerja bersama-sama untuk menjaankan kebijakan untuk mencapai tujuan bersama (Suprpto, 2019).

Kebijakan publik dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya itu bersifat mendasar karna kebijakan hanya menggaris bawah pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Rhamdani, 2017).

Undang-undang no 24 tahun 2011 menetapkan, jaminan social kesehatan nasional diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk jaminan kesehatan nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, dimulai 1 januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam peraturan pemerintah dan peraturan presiden, peraturan pemerintah No.101 tahun 2012

tentang penerima Iuran (PBI); Peraturan Presiden No 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan dan peta jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional). Program jaminan kesehatan dijalankan secara nasional dengan prinsip asuransi social, prinsip ekuitas dan sistemnya berupa sistem gotong royong dimana peserta mampu dan sehat akan membantu peserta yang miskin dan sakit. (Hartati, 2015)

Rumah sakit yaitu lembaga yang menangani masalah pelayanan kesehatan mempunyai peranan yang cukup besar dalam rangka menciptakan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Arti penting rumah sakit yaitu salah satu unsur dalam kerangka tatanan atau sistem kesehatan nasional yang harus dapat memenuhi tujuan pembangunan kesehatan. (Rizal, 2017)

Namun dikalangan masyarakat muncul persepsi yang masih kurang baik dengan program BPJS Kesehatan, seperti kurangnya pelayanan petugas kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan. Sikap petugas yang kurang ramah terhadap pasien BPJS Kesehatan dan tempat (ruangan) pasien BPJS Kesehatan yang kurang memadai. Oleh karna itu dengan banyaknya masalah yang terjadi dalam pelayanan pasien kartu BPJS Kesehatan, penulis berinisiatif mengkaji bagaimana persepsi masyarakat dalam implementasi kebijakan publik tentang BPJS Kesehatan di Desa Segerang Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu, jenis penelitian deskriptif kuantitatif karena menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta menampilkan hasilnya. Dan dideskripsikan secara deduksi yang berangkat dari teori-teori umum, lalu dengan observasi untuk menguji validitas keberlakuan teori tersebut ditariklah kesimpulan. Kemudian dijabarkan secara deskriptif, karena hasilnya akan diarahkan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh dan untuk menjawab rumusan masalah. Dan pada umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi, organisasi, aktivitas social, dan lain-lain.

Penelitian deskriptif kuantitatif. Muh. Khalifah Mustamin Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode deskriptif ini mengadakan klarifikasi terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu (Sujarweni, 2018).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di desa Segerang Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar. Dan Penelitian ini dilakukan sejak penelitian pada 15 NOVEMBER 2019 sampai pada saat ujian skripsi di laksanakan tepat pada tanggal 7 Juli 2020

Populasi dan Sampel

- Populasi adalah keseluruhan jumlah terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 411 kepala keluarga.
- Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Sehingga dari itu sampel adalah bagian dari populasi itu sendiri. Sehingga untuk memperoleh sampel tentunya harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh beberapa pertimbangan. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik sampling purposive. Menurut Sugiyono (2011:84) Sampling bertujuan (purposive sampling), yaitu teknik sampling yang digunakan peneliti dimana peneliti memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampel.kriteria dalam penentuan sampel pada penelitian ini, yaitu Masyarakat pengguna BPJS Kesehatan Mandiri 17 orang dan 60 orang masyarakat pengguna BPJS Kesehatan yang di biayai pemerintah jadi jumlah sampel secara keseluruhan yaitu 70 orang.

Defenisi Operasional Variabel

- Persepsi Implementasi kebijakan public yaitu tanggapan masyarakat tentang penerapan kebijakan pemerintah terhadap orang banyak.
- BPJS Kesehatan (Badan penyelenggara jaminan social kesehatan) merupakan badan usaha milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan seluruh rakyat Indonesia.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah oleh peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

- Metode angket atau koesioner Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis dalam bentuk pilihan ganda kepada responden untuk dijawab.
- Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada narasumber secara tatap muka dengan sumber data atau narasumber.
- Observasi atau pengamatan langsung yang dilakukan di lokasi penelitian.

Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan dan keterangannya secara tertulis, tergambar, terekam atau tercetak.(Sujarweni, 2018)

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik.

Analisis statistik deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data.

$$P = F/n \times 100\%$$

Ket:

P = Presentase

F = Frekuensi jawaban responden

n = jumlah responden

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan nila angket/kuisioner yang dihimpun dan diolah dari 77 responden, maka untuk mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan variable penelitian yang telah diperoleh

a. Pengetahuan masyarakat tentang implementasi BPJS Kesehatan.

- Apakah anda tau bagaimana aturan-aturan dalam bpjs Kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa. Hal ini terlihat dari jumlah responden yang menjawab sangat tahu yaitu sebesar 29,41%, responden yang menjawab sangat cukup tahu sebanyak 58,82%, responden yang menjawab kurang tahu sebesar 11,7%, dan tak seorangpun responden yang sama sekali tidak memahami aturan-aturan dalam BPJS Kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang aturan-aturan dalam BPJS Kesehatan cukup tahu, mengapa cukup tahu karna masyarakat pengguna BPJS mandiri rata-rata berpendidikan.

- Apakah anda tau arti dan pentingnya BPJS Kesehatan.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terlihat dari jumlah responden yang menjawab sangat tahu yaitu sebesar hal ini terlihat dari jumlah responden yang menjawab sangat tahu sebesar 17,64%, responden yang menjawab cukup tahu sebanyak 52,94% responden yang menjawab kurang tahu sebesar 29,41%, dan tak seseorang respponden yang sama sekali tidak mengetahui arti dan pentingnya BPJS kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang arti dan pentingnya BPJS Kesehatan yaitu cukup tahu, mengapa cukup tahu, mengapa cukup tahu karna sebelum dia mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan.

- Apakah anda tau kegunaan BPJS Kesehatan

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari jumlah responden yang menjawab sangat tahu yaitu sebesar 29,41%, responden yang menjawab cukup tahu sebanyak 70,58%, dan tak seorangpun masyarakat yang kurang tahu atau tidak tahu tentang kegunaan BPJS Kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang kegunaan BPJS Kesehatan cukup tahu, mengapa cukup tau karna sebelum dia mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan mandiri mereka mencari tau dulu tentang BPJS Kesehatan.

b. Pemahaman Responden tentang BPJS Kesehatan.

1. Apakah anda paham tentang manfaat BPJS Kesehatan.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dilihat dari jumlah responden yang menjawab sangat paham yaitu sebesar 35,29%, responden yang menjawab cukup paham sebanyak 23,52%, responden yang menjawab kurang paham sebesar 41,17%, dan tak seorangpun masyarakat yang tidak paham tentang manfaat BPJS Kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang manfaat BPJS Kesehatan cukup paham. Mengapa cukup paham karna sebelum dia mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan mandiri mereka mencari tahu dulu tentang manfaat BPJS Kesehatan tetapi masi ada juga yang kurang paham.

2. Apakah anda paham tentang prosedur pelayanan dalam Mengurus BPJS Kesehatan.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dilihat dari jumlah responden yang cukup paham sebanyak 29,41%, responden yang menjawab kurang paham sebesar 41,17% dan respon yang menjawab tidak paham sebesar 29,41%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang prosedur pelayanan dalam mengurus BPJS Kesehatan yaitu kurang paham. Mengapa masyarakat kurang paham karna masyarakat hanya tahu dasarnya saja.

3. Apakah anda paham tentang pembayaran iuran

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan dilihat dari jumlah responfen yang menjawab sangat paham yaitu sebesar 41,17%, responden yang menjawab cukup paham yaitu 35,29%, sedangkan kurang paham sebesar 23,52% dan responden yang menjawab tidak paham sebesar 0%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang pembayaran iuran yaitu cukup paham. mengapa masyarakat cukup paham dengan pembayaran iuran karna sebelum menggunakan kartu BPJS Kesehatan mereka suda tau BPJS Kesehatan kelas berapa yang ia akan gunakan dan berapa iuran yang mereka harus bayar.

4. Apakah anda paham tentang pelayanan apa saja yang ditanggungkan oleh BPJS Kesehatan.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terlihat dari jumlah responden yang cukup paham sebanyak 41,17%, responden yang menjawab kurang paham sebesar 11,76% dan responden yang menjawab tidak paham sebesar 47,05%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang pelayanan apa saja yang ditanggungkann BPJS Kesehatan yaitu tidak paham karna masyarakat hanya tau ketika mereka telah berobat ke rumah sakit.

c. Sikap responden tentang pelayanan implementasi kebijakan BPJS Kesehatan.

1. Bagaimana fasilitas yang anda dapat dalam berobat menggunakan kartu BPJS Kesehatan.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dilihat dari jumlah responden yang menjawab cukup bagus sebanyak 82,35%, responden yang menjawab kurang bagus sebesar 12% dan responden yang menjawab tidak bagus sebesar 6%. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa fasilitas yang dirasakan masyarakat yaitu cukup bagus karna BPJS mandiri itu punya tingkatan jadi fasilitasnya itu tergantung BPJS Kelas berapa yang mereka pakai.

2. Bagaimana sikap tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan.

Berdasarkan data pada table diatas dapat disimpulkan bahwa,hal ini terlihat dari jumlah responden yang menjawab cukup bagus sebanyak 29,41%, responden yang menjawab kurang bagus sebesar 41,17 dan responden yang menjawab tidak bagus sebesar 29,41%, sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap tenaga kesehatan terhadap masyarakat yaitu kurang bagus karna tenaga kesehatan kuraang ramah terhadap pasien BPJS Kesehatan.

3. Bagaimana system pelayanan BPJS Kesehatan dalam mengurus obat.

Berdasarkan data pada table diatas dapat disimpulkan bahwa dilihat dari jumlah responden yang menjawab sangat bagus yaitu sebesar 29,41%, responden yang menjawab cukup bagus sebanyak 35,29%, responden yang menjawab kurang bagus sebesar 29,41%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan dalam mengurus obat yaitu cukup bagus karna tidak antri terlalu lama.

4. SIMPULAN

BPJS Kesehatan (Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan) adalah badan usaha milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat dalam implementasi kebijakan publik tentang tentang BPJS Kesehatan mandiri ditinjau dari pengetahuan tentang aturan-aturan dalam BPJS Kesehatan, seperti tepat waktu dalam membayar iuran, sedangkan persepsi masyarakat ditinjau dari pemahaman tentang BPJS Kesehatan masi kurang baik karna di Desa Segerang tidak pernah ada sosialisasi tentang BPJS Kesehatan, dan persepsi masyarakat tentang pelayanan dalam menggunakan kartu BPJS Kesehatan dilihat dari sikap tenaga kesehatan yang kurang ramah terhadap terhadap pasien BPJS Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mania manja, 2017. Analisis hubungan persepsi bauran pemasaran dengan minat petani dalam kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri Di Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, jurnal kesehatan masyarakat, volume 5, nomor 3, juli 2017.
- Widiastuti ika, 2017. Pelayanan badan penyelenggara jaminan social (BPJS) Kesehatan di jawa barat, jurnal ilmiah, volume 4 nomor 1 januari 2017.

- Rajagukguk Tiur, 2019. Analisis implementasi kebijakan BPJS Kesehatan terhadap pelayanan puskesmas (type perawatan) di Kota Medan, *Jurna Manajemen Volume 5 Nomor 2* (2019).
- Suprpto, 2019. Implementasi Kebijakan diskresi pada pelayanan kesehatan badan penyelenggara jaminan kesehatan (BPJS), *Jurnal imiah kesehatan vol 7, Issue, I, pp.1375, juni 2019*.
- Ramadhani Abdullah, 2017. Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik, *Jurnal publik Vol. 11; No 01; 2017;1-12*.
- Hartati widia, 2015. Kajian yuridis perubahan pt persero menjadi badan penyelenggara jaminan social (BPJS) kesehatan. *Jurnal IuS, Vol. III Nomor 9 Desember 2015*.
- Rizal rosiana, 2017. Pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pasien peserta BPJS Kesehatan sebagai mediasi terhadap loyalitas pasien. *Jurnal sains farmasi dan klinis, Vol.03 No. 2 mei 2017*.
- Sujarweni V. Wiratna 2018. *Metodologi Penelitian lengkap praktis dan mudah dipahami*.

m